

# Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis

Rahmi Hakim<sup>1</sup> Ema Fitri Lubis<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution  
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
rahmihakim@student.uir.ac.id ema fitrilubis@soc.uir.ac.id

Received : August 20, 2024;

Accepted : 25 August 2024

## Abstract

*The problem related to the Family Hope Program (PKH) in Tanjung Kapal Village, Rupa District, Bengkalis Regency is that there are still school-aged children who have dropped out of school, especially at the elementary and middle school levels. and there are still many parents/pregnant women and young children (AUD) who do not have their health checked. The aim of the research is to review the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Tanjung Kapal Village, Rupa District, Bengkalis Regency and find out the obstacles to the Family Hope Program (PKH) in Tanjung Kapal Village, Rupa District, Bengkalis Regency. This research uses a qualitative descriptive research type. The informants for this research consisted of the Tanjung Kapal Village Head, the Village Head Secretary, PKH Facilitators, and Community Recipients of the Family Hope Program (PKH). Data collection techniques in research are observation, data presentation and drawing conclusions. Based on the research results, it is known that effectiveness can be seen from socialization through deliberation. Efficiency can be seen from the mechanism for distributing funds for the Family Hope Program (PKH) which is divided into three months with the nominal amount adjusted to the recipient category.*

**Keywords:** Program Evaluation, Family Hope Program, and Village

## Abstrak

Permasalahan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis yaitu masih ada anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah, khususnya pada jenjang SD dan SMP. dan Masih banyak orang tua/ibu hamil dan anak usia dini (AUD) yang tidak memeriksakan kesehatannya. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis dan mengetahui hambatan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten bengkalis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini terdiri dari Lurah Tanjung Kapal, Sekretaris Lurah, Pihak Pendamping PKH, dan Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah Observasi, Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan.

**Kata Kunci:** Evaluasi Program, Program Keluarga Harapan, Dan Kelurahan

## Pendahuluan

Administrasi merupakan suatu istilah yang sangat umum dan mencakup semua bidang kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk social, sehingga membutuhkan orang lain karena tidak mampu menjalankan seluruh aktivitas pemenuhan kebutuhan dan pencapaian seorang diri. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Didalam mencapai tujuan tersebut maka dibentuklah suatu organisasi, organisasi adalah sesuatu yang didirikan sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, oleh karena itu organisasi tersebut harus mengelola rangkaian kegiatan yang diarahkan guna mencapai tujuan organisasi, pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut yang dilakukan oleh manusia sebagai actor atau sebagai peserta organisasi.

Kemiskinan menjadi masalah serius yang dialami di Negara-negara kawasan Asia seperti di Indonesia baik itu didaerah perkotaan maupun di Pedesaan yang terpencil. Kemiskinan merupakan salah satu isu yang menjadi penghambat dalam pembangunan, karena masalah kemiskinan sudah menjadi masalah yang kompleks sehingga suatu Negara tidak mampu untuk mengatasi kemiskinan secara sendirian. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang lebih layak dengan standar kehidupan yang berlaku disekitarnya atau ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Untuk meminimalisasikan permasalahan kemiskinan, kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial meningkatkan efektivitas dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan utama dalam kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tahun 2022 diantaranya :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m<sup>2</sup> per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.

8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan dari dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Implementasi kedua Undang undang tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin serta Peraturan Menteri Sosial No.10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Dasar hukum tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri Sosial No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dimana peraturan ini

ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut senada dengan upaya percepatan pencapaian target Millenium Development Goals (MDG's). Lima komponen tujuan MDG's yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi, pengurangan angka kematian ibu melahirkan. Dimana secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) berfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada bidang kesehatan dan pendidikan. Program ini meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Miskin, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Miskin, meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, meningkatkan akses kualitas pelayanan pendidikan kesehatan Rumah Tangga Miskin.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial (Depsos, 2010) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster terbawah berupa bantuan bersyarat. Syarat yang diterapkan dalam program ini merupakan bentuk intervensi untuk membidik masalah kesejahteraan dan kesenjangan gender dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak mengherankan apabila dalam desain program PKH, bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak perempuan) yang biasa disebut Pengurus Keluarga. Pemberian dana kepada pengurus keluarga diyakini akan dapat mendorong efektifitas PKH dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima bantuan.

Secara umum, program ini memberikan bantuan uang secara tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan RTSM tersebut harus melakukan persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan yang dimaksud yakni berhubungan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Dengan harapan seperti yang dijelaskan dalam tujuan Program Keluarga Harapan, pelaksanaan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

Pasalnya, pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih mengalami beberapa permasalahan yang muncul. Keluarga penerima bantuan sosial PKH merupakan keluarga miskin sesuai dengan kriteria PKH yang termasuk kedalam komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dimana komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan balita, sedangkan komponen pendidikan meliputi anak sekolah yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, dan komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia dan penyandang disabilitas. Keluarga penerima bantuan sosial PKH ini juga memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bukti kartu peserta PKH. Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan serta

memperbaiki pemikiran masyarakat agar lebih mandiri. Akan tetapi, bantuan itu masih ada disalah artikan dan disalah gunakan oleh masyarakat (orang tua anak tersebut) sehingga bantuan tersebut bukan hanya digunakan untuk kebutuhan anak mereka saja, melainkan kebutuhan keluarga itu sendiri sehingga bantuan tersebut tidak bisa dirasakan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Fenomena yang sering terjadi dimasyarakat saat ini dengan menerima bantuan tersebut bukan lah membuat mereka memberikan pendidikan yang layak untuk anak mereka melainkan mereka mengambil bantuan tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka seperti memenuhi kebutuhan hidup pada sandang dan pangan mereka, hal ini dapat mempengaruhi pola pikir hidup masyarakat sehingga akan tetap terus menerus bergantung dari bantuan sosial PKH ini dan akan terus menggunakan bantuan tersebut bukan sesuai kepentingan program.

**Tabel 1 Data Masyarakat Miskin Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2022**

No	Alamat/Dusun	RT	Jumlah Masyarakat Miskin
1	Tanjung kapal	01	21
2	Tanjung kapal	02	26
3	Tanjung kapal	03	69
4	Tanjung kapal	04	33
5	Parit joko	05	20
6	Parit joko	06	68
7	Parit dua	07	50
8	Parit dua	08	47
9	Parit satu	09	32
10	Parit satu	10	43
11	Srirupat	11	56
12	Rampang jaya	12	59
13	Rampang jaya	13	53
14	Rampang	14	83
15	Rampang	15	49
16	Gunap	16	38
<b>Jumlah Total</b>			<b>747</b>

Sumber: Kantor Lurah Kelurahan Tanjung Kapal 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa angka kemsikinan di Kelurahan Tanjung Kapal cukup tinggi dengan total 747 Kepala Keluarga (KK), terutama pada Dusun Tanjung Kapal dengan jumlah 149 Kepala Keluarga (KK) dari empat RT. maka dari itu program PKH merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan yang dimulai pada tahun 2017 penerimaan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten bengkalis.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yakni Sasaran PKH merupakan Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial

**Tabel 2 Jumlah Penerima (PKH) Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun 2022**

No	Alamat	Jumlah Penerima PKH
1	Tanjung Kapal	56
2	Parit Joko	28
3	Parit Dua	19
4	Parit Satu	27
5	Srirupat	33
6	Rampang Jaya	21
7	Rampang	37
8	Gunap	31
<b>Jumlah</b>		<b>252</b>

Sumber : Kantor Lurah Kelurahan Tanjung Kapal 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada Alamat Tanjung Kapal memiliki jumlah KPM PKH yang paling banyak diantara alamat lainnya yaitu berjumlah 56 orang, Pada Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis khususnya di Kelurahan Tanjung Kapal yang mana pada tahun 2022 tercatat penerima dana bantuan PKH sebanyak 252 orang yang tersebar dari 16 RT dan 8 RW di Kelurahan Tanjung Kapal.

Sasaran atau Keluarga Penerima dana bantuan Non Tunai Program Keluarga Harapan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Namun disamping itu, sasaran atau keluarga penerima bantuan Non Tunai PKH yang bertempat tinggal di wilayah tertentu disebut dengan PKH akses yang merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah yang sulit di jangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun daya manusia dengan pengkodisian secara khusus.

Program PKH di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan semestinya. Untuk pelaksanaan hak dan kewajiban, belum berjalan dengan lancar sesuai SOP, dimana setiap komponen semuanya menerima fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Akan tetapi masih terjadi beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Padahal tujuan PKH adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Untuk itu diperlukan kontribusi pendamping PKH dalam mendampingi KPM untuk melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup. Dari penjelasan diatas peneliti hanya memfokuskan 2 kriteria saja, yaitu kriteria komponen pendidikan dan kriteria komponen kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan penulis menemukan beberapa fenomena yang ditemui saat dilapangan sebagai data di Kelurahan Tanjung Kapal kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis peneliti menemukan pada komponen pendidikan bahwa masih ada anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah, khususnya pada jenjang SD dan SMP. yang terdiri dari pendidikan dasar (SD) 17 orang, dan sekolah menengah pertama (SMP) 26 orang. Sebagian dari anak tersebut memutuskan untuk bekerja membantu perekonomian orang tua nya, Dibidang kesehatan penerima PKH tidak mengikuti program kegiatan yang diwajibkan seperti posyandu. Masih banyak orang tua/ibu hamil dan anak usia dini (AUD) yang tidak memeriksakan kesehatannya, ini dilihat dari jumlah KPM bidang kesehatan berjumlah 34 yang rutin memeriksakan kesehatannya hanya 16 orang (sumber posyandu kelurahan tanjung kapal).

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Konsep Administrasi**

Menurut Sondang P. Siagian (2003 : 3) administrasi sebagai keseluruhan proses bekerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi sebagai proses, yakni dikatakan sesuatu yang permulaannya diketahui akan tetapi akhirnya tidak diketahui. Dengan demikian administrasi adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Bila proses itu akan berakhir tidak diketahui karena bila kedua orang itu akan memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dan tidak ada yang mengetahui.

Menurut Woodrow Wilson administrasi merupakan suatu bidang usaha (a field of business) dan harus dipisahkan dari politik dalam Miftah Thoha, (2008 : 8). Menurut Prajudi Atmosudirjo administrasi adalah suatu fenomena social, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat administrasi dalam Inu Kencana Syafii (2015 :4).

## **Konsep Organisasi**

Menurut James D. Mooney organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester I. Barnard memberikan pengertian Organisasi yaitu suatu system aktivitas kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih (Zulkifli dan Nurmasari, 2015 : 99)

Menurut Sondang P. Siagian (2003 : 6) organisasi adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan bawahan. Dari definisi-definisi yang telah di jelaskan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota organisasi, penetapan hubungan antarpekerjaan yang efektif diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien.

## **Konsep Manajemen**

Menurut Sondang P. Siagian (2003 : 5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang , yakni sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka penacapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Sedangkan Henry Simamora berpendapat manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan- tujuan yang ditetapkan dalam Harbani Pasolong (2016 : 83). Menurut Haiman manajemen adalah fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan dalam Zulkifli dan Nurmasari (2015 : 5).

Menurut Darwis, et.al. manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia dalam Made Devi Wedayanti (2018 : 3)

James A.F Stoner dan Charles Wankel manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi dalam Siswanto (2015 : 2).

## **Konsep Kebijakan Publik**

Syafiie memaparkan bahwa kebijakan hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan penetapan aturan yang ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Untuk itu syafiie memaparkan bahwa kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangu, dan mencegah suatu keburukan serta

sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah (Arifin Tahir, 2015 : 20). Sedangkan menurut Anderson kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah (Arifin Tahir, 2015: 21).

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka kebijakan publik adalah seluruh sarana prasarana untuk mencapai tempat tujuan tersebut (Rian Nugroho 2003 : 51)

Menurut William N. Dunn kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh Lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, Pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (Harbani Pasolong, 2016 : 39).

Chaizi Nasucha mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat yang akan menjadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis (Harbani Pasolong, 2016 : 39).

### **Konsep Evaluasi**

William N. Dunn (2003:608) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal) pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan publik. Ia merupakan unsur yang penting dalam siklus kebijakan, sama pentingnya formulasi, dan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan publik yang berkualitas hanya mungkin dicapai jika siklus itu mendapat perhatian seimbang, dalam hal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal ini relevan dengan pendapat Dye (2002 : 45).

Menurut Dye dalam Parsons (2008:545) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan sebagai pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Lester dan Stewart dalam Chazali H. Situmorang (2016: 282), evaluasi bisa dibagi menjadi dua tugas yang terpisah. Tugas utamanya ialah menetapkan dampak dari kebijakan melalui mendeskripsikan efeknya (apakah program kebijakan publik sudah mengalami keberhasilan berdasarkan tujuan yang diharapkan atau tidak). Tugas yang lainnya ialah mengevaluasi keberhasilan atau gagalnya dalam sebuah kebijakan terhadap kriteria atau kondisi yang diberikan. Berdasarkan berbagai definisi yang dipaparkan oleh para ahli di atas, bisa diambil simpulan bahwasanya evaluasi adalah sebuah aktifitas yang bertujuan untuk mengetahui implementasi selanjutnya menilai perkembangan kebijakan,

apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan benar atau belum, dan juga menjadi penentu apakah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

### **Konsep Evaluasi Program**

Komitmen dan perubahan pola pikir peserta PKH Program didefinisikan sebagai unit fungsional yang mewakili implementasi atau berlangsungnya pelaksanaan kebijakan pada proses yang berkelanjutan pada sebuah organisasi yang melibatkan seseorang (Arikunto dan Jabar, 2009: 4). Dalam program memiliki unsur-unsur terpenting di dalamnya, diantaranya:

- a. Program ialah pelaksanaan dari sebuah kebijakan
- b. Prosesnya memerlukan jangka waktu yang lama, serta bukan merupakan proses satu kali tetapi beberapa proses yang berkelanjutan
- c. Terjadi pada sebuah organisasi yang melibatkan seseorang.

Johanna dalam Rusydi Ananda (2017:5) mendefinisikan program ialah segala upaya yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan harapannya akan menghasilkan suatu hasil maupun akibat. Menurut penjelasan yang diberikan oleh beberapa ahli di atas, bias diartikan bahwasanya program ialah suatu perencanaan yang meliputi sejumlah unit yang memuat pedoman serta serangkaian aktifitas yang perlu diselesaikan berdasarkan waktu yang ditetapkan. Dalam hal ini program adalah serangkaian kegiatan yang terencana.

Menurut Briekerhoff dalam Ananda (2017:6) pengertian evaluasi program ialah sebuah proses dalam menetapkan berapa banyak tujuan program sudah dicapainya, memberi informasi dalam mengambil keputusan, melaksanakan kinerja berdasarkan standar dalam mengidentifikasi ketidakseimbangan, harga, serta memeriksa nilai secara sistematis atau kualitas barang. Dari sejumlah pengertian di atas, bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa evaluasi program ialah sebuah aktifitas untuk mendapatkan informasi mengenai berfungsinya program, berdasarkan alternatif mana yang ditentukan atau solusi yang tepat untuk masalah dipilih dalam proses pengambilan keputusan.

### **Metode**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumen. Adapun teknik penulisan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap Reduksi data, Tahap penyajian data (*display*), Tahap penarikan kesimpulan (verifikasi).

### **Hasil dan Pembahasan**

Efektivitas berasal dari kata (*effectiveness*) yang berarti pencapaian keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga disebut dengan hasil guna, selain itu efektivitas juga selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan yang diadakannya tindakan, dan efektivitas selalu diukur dari unit produk atau layanan serta nilai moneterinya. (William N Dunn, 2003:429)

Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal dalam menilai kepuasan masyarakat cukup relatif karena

masyarakat masih merasa kurang dari dana bantuan yang di terima masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal selain itu dapat di katakan kepuasan bagi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis sudah cukup puas karena dapat membantu perekonomian masyarakat baik untuk modal usaha maupun untuk membayar hutang para masyarakat.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, wawancara dan hasil observasi maka dapat di simpulkan bahwa pada indikator efektifitas dalam fakta lapangan diketahui bahwa masyarakat masih merasa kurang dari dana bantuan yang di terima masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal.

### **Efisiensi**

Efisiensi (*eficiency*) lebih berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang biasanya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. (William N Dunn, 2003:430). Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar daripada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula efisiensi yang dicapai (Mardiasmo, 2009: 133).

**Tabel 3 Nominal yang di Terima Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis**

No	Kategori	Indeks/ Tahun (Rp)	Indeks/Per 3 Bulan (Rp)
1	Ibu hamil	3.000.000	750.000
2	Anak usia dini	3.000.000	750.000
3	Anak sekolah SD	900.000	225.000
4	Anak sekolah SMP	1.500.000	375.000
5	Anak sekolah SMA	2.000.000	500.000
6	Lanjut usia 70+	2.400.000	600.000
7	Disabilitas berat	2.400.000	600.000

Sumber: Kementerian Sosial RI

Dari tabel diatas diketahui bahwa nominal yang di terima peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis berbeda-beda untuk setiap kategori. Selain itu penerimaan bantuan di lakukan dalam pertiga

bulan sehingga dalam setahun diterima dalam empat kali pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam mekanisme penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dibagi dalam tiga bulan dengan jumlah nominalnya di sesuaikan dengan kategori penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di ketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) nominal yang di terima peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis berbeda-beda untuk setiap kategori. Selain itu penerimaan bantuan di lakukan dalam pertiga bulan sehingga dalam setahun diterima dalam empat kali pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, wawancara dan hasil observasi maka dapat di simpulkan bahwa pada indikator efisiensi dalam fakta lapangan diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal dalam penyalurannya atau pencairan dana itu pertiga bulan jadi dalam satu tahun ada empat kali penyaluran dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

### **Kecukupan**

Kecukupan (adequacy) yaitu seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan terjadinya masalah (Wiliam N Dunn, 2003: 430). Menurut Wiliam N. Dunn (2003;608) kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam kecukupan nominal bantuan dana terhadap kebutuhan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis sangat relatif tergantung dalam penggunaan dan ketepatan guna oleh masyarakat terhadap dana bantuan yang di berikan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di ketahui bahwa dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal jika dilihat dari sisi bantuan sudah cukup digunakan dengan tepat misalnya digunakan sebagai modal usaha atau misalnya di belikan pupuk untuk petani atau untuk bantuan pembayaran sekolah namun kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang menggunakan dana bantuan tidak dengan bijak.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, wawancara dan hasil observasi maka dapat di simpulkan bahwa pada indikator kecukupan dalam fakta lapangan diketahui bahwa diketahui masih ada masyarakat yang menggunakan membeli baju atau beli barang yang kurang prioritas dan sebaiknya dana bantuan di gunakan untuk modal berjualan sehingga dapat berkembang.

### **Pemerataan**

Rahmi Hakim dan Ema Fitri Lubis

Dalam mendefinisikan tujuan secara eksplisit tujuan dari masyarakat secara keseluruhan adalah untuk mengukur kesejahteraan sosial, yaitu kepuasan agregat yang dialami oleh sejumlah komunitas. Namun diketahui, individu dan kelompok mempunyai nilai yang berbeda. Apa yang memuaskan seseorang atau suatu kelompok acapkali tidak memuaskan lainnya. (William N Dunn, 2003:435). Pemerataan dalam mendefinisikan tujuan secara eksplisit tujuan dari masyarakat secara keseluruhan adalah untuk mengukur kesejahteraan sosial, yaitu kepuasan agregat yang dialami oleh sejumlah komunitas. Namun diketahui, individu dan kelompok mempunyai nilai yang berbeda. Apa yang memuaskan seseorang atau suatu kelompok acapkali tidak memuaskan lainnya (William N Dunn, 2003: 435).

Berdasarkan hasil dokumentasi diatas diketahui bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sudah cukup tepat jika dilihat dari kondisi rumah yang sederhana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di ketahui bahwa bahwa kesesuaian dan ketetapan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sudah cukup tepat namun perlu ada penambahan peserta karena banyak masyarakat yang belum terdaftar.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, wawancara dan hasil observasi maka dapat di simpulkan bahwa pada indikator pemerataan dalam fakta lapangan diketahui bahwa kesesuaian dan ketetapan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sudah cukup tepat namun perlu ada penambahan peserta karena banyak masyarakat yang belum terdaftar.

### **Responsivitas**

Menurut Wiliam N. Dunn (2003;608) responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa ada saran yang perlu dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu dari sisi jumlah nominal yang diterima, dari sisi jumlah peserta karena masih banyak masyarakat miskin tapi belum masuk ke pesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis selain itu dari sisi jumlah sumber daya juga perlu di tambah karena dari jumlah pendamping yang masih minim.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di ketahui dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal diketahui bahwa adanya saran dari jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal supaya dapat di tambah lagi di tahun yang akan datang. Selain itu Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal diketahui bahwa ada juga saran untuk penambahan anggota pendamping karena dengan jumlah pendamping yang ada membuat kewalahan dalam mendampingi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, wawancara dan hasil observasi maka dapat di simpulkan bahwa pada indikator responsivitas dalam fakta lapangan diketahui bahwa adanya saran dari jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal supaya dapat di tambah lagi di tahun yang akan datang.

### **Ketepatan**

Menurut Wiliam N. Dunn (2003;608) Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di ketahui bahwa peserta program memiliki kondisi masyarakat yang miskin sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun, Program Keluarga Harapan (PKH) masih banyak dari masyarakat yang dalam praktek penggunaan dana bantuan dengan tidak tepat misalkan dengan gunakan sebagai modal usaha.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, wawancara dan hasil observasi maka dapat di simpulkan bahwa pada indikator ketepatan dalam fakta lapangan diketahui bahwa peserta program memiliki kondisi masyarakat yang miskin sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

### **Faktor Penghambat**

1. Penggunaan Program Yang Tidak Bijak  
Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal diketahui masih ada masyarakat yang menggunakan membeli baju atau beli barang yang kurang prioritas dan sebaiknya dana bantuan di gunakan untuk modal berjualan sehingga dapat berkembang.
2. Terbatasnya jumlah peserta  
Kesesuaian dan ketetapan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis sudah cukup tepat namun perlu ada penambahan peserta karena banyak masyarakat yang belum terdaftar.
3. Banyak masyarakat yang belum paham tentang program  
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan penggunaan dana bantuan dengan tepat. Hal ini dapat dikatakan karena masih minimnya sosialisasi terkait penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis dengan tepat guna.

### **Kesimpulan**

Secara keseluruhan pada hasil sebaran kuesioner terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis diketahui kesimpulan bahwa sudah berjalan cukup baik yang dilihat dari :

1. Efektifitas terlihat dari sosialisasikan atau di perkenalkan dengan cara melakukan musyawarah dengan masyarakat serta ada pembagian brosur dan para pendamping

mendatangi para peserta untuk menjelaskan terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Efisiensi dapat dilihat dari mekanisme penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis dibagi dalam tiga bulan dengan jumlah nominalnya disesuaikan dengan kategori penerima
3. Kecukupan dapat dilihat dari dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang dapat digunakan sebagai modal usaha sehingga dengan hasil usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.
4. Pemerataan dapat dikatakan sudah cukup tepat namun perlu ada penambahan peserta karena banyak masyarakat yang belum terdaftar.
5. Responsivitas dilihat dari masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan penggunaan dana bantuan dengan tepat.
6. Ketepatan dilihat dari sudah cukup sesuai Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal di lapangan sebagaimana guna untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya namun dari sisi pelaksanaan di lapangan masih ada yang belum sesuai dari segi penggunaan dana

Sedangkan dari sisi hambatan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis yaitu:

1. Penggunaan program yang tidak bijak
2. Terbatasnya jumlah peserta
3. Banyak masyarakat yang belum paham tentang program

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku dan Jurnal:**

- Ananda, R. & Rafida, T. 2017. Pengantar Evaluasi Program Pendidikan. Medan: Perdana Publishing
- Arifin Tahir. 2015. Kebijakan Publik Transparansi & Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfa Beta
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. Evaluasi program. Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chazali H. Situmorang. 2016. Kebijakan Publik (Teori analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). Depok. Social Security Development Institute
- Dye, Thomas R. 2002. 2002. Understanding Public Policy. Toronto
- Harbani Pasolong. 2016. Teori Administrasi Publik. Bandung, Penerbit Alfabeta
- Inu Kencana Syafii. 2015. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI). Jakarta, PT Bumi Aksara
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Miftah Thoha. 2008. Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta, PT Adhitya Andrebina Agung

Rahmi Hakim dan Ema Fitri Lubis

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lintas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.

- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024).

PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.

- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of

Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.

- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi

Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.

TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.

Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).

Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".

Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.

Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.

Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.

Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.

Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.

Parsons, Wayne. 2006. *Publik Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis. Kebijakan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

### **Regulasi:**

Peraturan Menteri Sosial No 1 tahun 2018

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Rian Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta, PT Elex Media Komputindo

Siswanto, 2015. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara

Sondang P. Siagian. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, PT Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Wiliam N. Dunn.2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University

Zulkifli dan Nurmasari, 2015. Pengantar Manajemen. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh